

Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus UPT Puskesmas Banyudono I)

Nita Cahyaningsih¹, Rukmini², Muhammad Hasan Ma'ruf³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia.

Alamat Email:

nitacahya584@gmail.com¹, rukmini.stie.aas@gmail.com², hasan.stie.aas@gmail.com³

Situs Artikel:

Cahyaningsish, N., Rukmini, & Ma'ruf, M. H. (2024). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus UPT Puskesmas Banyudono I). *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 3(1), 449-455.

Abstract: This study aims to determine the effect of financial supervision, accountability and transparency on employee performance. The research method used is quantitative. The data source used is primary data obtained from distributing questionnaires. The population in this study were all employees in the Banyudono I Health Center area, Banyudono District, Boyolali Regency, with 50 respondents. The sampling technique uses saturated sampling. The research data was processed using multiple linear regression tests with the help of the SPSS version 23 program. Based on the results of the study it can be concluded that supervision, accountability and transparency have a significant influence on employee performance at UPT Puskesmas Banyudono I, Banyudono District, Boyolali Regency.

Keywords: Supervision, Accountability, Transparency, Performance.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner. Populasi pada penelitian ini seluruh pegawai yang berada di wilayah Puskesmas Banyudono I, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, dengan responden 50 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan program. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan, akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di UPT Puskesmas Banyudono I, Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.

Kata Kunci: Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja

1. Pendahuluan

Tata kelola keuangan Pemerintah di Indonesia telah mengalami perubahan pada saat bergulirnya reformasi, sehingga memberikan dampak kepada Indonesia. Bergulirnya reformasi tersebut muncul karena adanya desentralisasi. Desentralisasi melahirkan otonomi daerah menyebabkan pemerintahan dituntut oleh masyarakat memiliki

kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi.

Kinerja merupakan suatu hasil atau kondisi yang perlu diketahui dan dilaporkan kepada pihak tertentu guna mengetahui melihat



pencapaian hasil dari suatu instansi dengan tujuan yang diemban oleh suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan operasional tersebut. Terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat. Pemerintah yang baik memiliki hasil dari kegiatan atau kinerja program yang telah direncanakan berhasil dalam mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat (Perpres Nomor 29 Tahun 2014).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Selain pengawasan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan benar. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik, sehingga akan berdampak baik bagi masyarakat. Dengan begitu kinerja pemerintah dapat dikatakan baik apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah

kepada masyarakat dalam memberikan informasi keuangan yaitu wujud pertanggungjawaban pemerintah (PP. No 71 Tahun 2010). Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Corporate Governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah.

Menurut Purnama & Nadirsyah, (2016), dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya" menunjukkan hasil bahwa pengawasan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan, akuntabilitas dan transparansi keuangan semakin meningkat kinerja pegawai. Penelitian tersebut sesuai dengan Kurniawan & Efendi (2019) bahwa Pengaruh pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Jitmau, et al., (2017) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai.

Penelitian ini pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Purnama & Nadirsyah (2016). Persamaan penelitian ini adalah menggunakan semua varibel serta metode pengambilan sampel yang sama. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian ini di



Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan uraian di atas maka dari itu perlunya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini dilakukan pada UPT Puskesmas Banyudono I, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan terhadap kinerja pegawai, 2) Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap kinerja pegawai, 3) Untuk mengetahui pengaruh transparansi keuangan terhadap kinerja pegawai.

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Penilaian Kinerja

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 membahas Penilaian Kinerja PNS. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dimana pada 26 April 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang dikenal dengan ASN. Kinerja adalah tingkat terhadapnya para pegawai mencapai persyaratan pekerjaan secara efisien dan efektif (Simamora, 2006). Sedangkan pengertian kinerja merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi.

2.2. Pengelolaan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah

yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

2.3. Pengawasan

Menurut undang-undang nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, "Pengawasan adalah dapat di definiskan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan - kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

2.4. Akuntabilitas

Menurut Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (2003) "Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

2.5. Transparansi

Transparasi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (standar akuntansi pemerintah, 2020).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan data primer dengan Teknik pengambilan data menggunakan kuisioner.



Populasi dalam penelitian ini seluruh karyawan/pegawai di UPT Puskesmas Banyudono I. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh dengan responden 50 orang.

Analisis data yang digunakan untuk mengolah data penelitian ini yaitu dengan analisis statistic deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis linear berganda, uji Kelayakan Model, Uji t, dan Uji koefisien determinasi (R^2).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Hasil uji validitas dan reliabilitas:

Tabel 1. Hasil uji validitas

Item pernyataan	r hitung	r tabel	Signifikansi	Ket
X1.1	0,801	0,279	0,000	Valid
X1.2	0,732	0,279	0,000	Valid
X1.3	0,754	0,279	0,000	Valid
X1.4	0,828	0,279	0,000	Valid
X2.1	0,869	0,279	0,000	Valid
X2.2	0,710	0,279	0,000	Valid
X2.3	0,660	0,279	0,000	Valid
X2.4	0,744	0,279	0,000	Valid
X2.5	0,858	0,279	0,000	Valid
X3.1	0,816	0,279	0,000	Valid
X3.2	0,783	0,279	0,000	Valid
X3.3	0,798	0,279	0,000	Valid
X3.4	0,829	0,279	0,000	Valid
Y1	0,731	0,279	0,000	Valid
Y2	0,638	0,279	0,000	Valid
Y3	0,664	0,279	0,000	Valid
Y4	0,742	0,279	0,000	Valid
Y5	0,818	0,279	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh nilai item pernyataan dari Pengawasan (X1), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X3), Kinerja (Y) mempunyai nilai r hitung $>$ r tabel dan nilai signifikansi $<$ 0,05. Sehingga keempat

variabel tersebut dinyatakan valid.

Tabel 2. Hasil uji reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha Coefficient	Nilai Kritis	Ket
Pengawasan (X1)	0,775	0,60	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,816	0,60	Reliabel
Transparansi (X3)	0,820	0,60	Reliabel
Kinerja P (Y)	0,743	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2023

Dilihat dari pengujian reliabilitas, nilai Cronbach's Alpha dari masing-masing variabel dinyatakan reliabel sebab nilai Cronbach's $>$ Nilai kritis. Jadi semua item pernyataan dalam semua variabel dinyatakan lolos dalam uji reliabilitas.

Tabel 3. Hasil uji t

Variabel	T _{tabel}	T _{hitung}	Sig
(Constant)	1, 67866	0,655	0,516
Pengawasan (X1)	1, 67866	2,934	0,005
Akuntabilitas (X2)	1, 67866	2,419	0,020
Transparansi (X3)	1,67866	3,048	0,004

Tabel 4. Hasil uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	426,528	3	142,176	31,279	0,000 ^b
Residual	209,092	46	4,545		
Total	635,620	49			

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,819 ^a	0,671	0,650	2,132

Sumber: Data primer yang diolah, 2023.

Tabel 3 menjelaskan bahwa pengawasan mempunyai nilai thitung sebesar $2,934 > t$ -tabel 1, 67866 dengan nilai signifikan $0,005 < 0,05$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H1 diterima H0 ditolak. Hal ini mempunyai arti bahwa penggunaan Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Variabel akuntabilitas mempunyai nilai thitung sebesar 2, 419 $>$ ttabel 1, 67866 dengan nilai signifikan 0,020



$< 0,05$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H_1 diterima H_0 ditolak. Hal ini mempunyai arti bahwa penggunaan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Variabel transparansi mempunyai nilai thitung sebesar 3,048 $>$ ttabel 1, 67866 dengan nilai signifikan 0,004 $< 0,05$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H_1 diterima H_0 ditolak. Hal ini mempunyai arti bahwa penggunaan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.

Tabel 4 menjelaskan bahwa bahwa Fhitung sebesar 31,279 $>$ Ftabel 2,80 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 $< 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya tabel 5 menjelaskan besarnya koefisien determinasi (r^2 square) = 0,650, artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas sebesar 65% sisanya sebesar 35% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.2. Pembahasan

- 1) Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus UPT Puskesmas Banyudono I)

Berdasarkan hasil analisis dan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan adanya uji t yaitu thitung 2,934 $>$ ttabel 1, 67866 dan tingkat signifikansinya 0,005 $< 0,05$. Hal ini berarti H_a dapat diterima dan H_0 ditolak sehingga pengawasan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai, semakin adanya pengawasan keuangan terhadap kinerja, maka akan semakin meningkatkan kinerja pegawai secara keseluruhan.

Pengawasan dalam pengelolaan keuangan sangat di perlukan untuk mengantisipasi adanya penyelewengan terhadap keuangan. Karena penyelewengan sangat riskan terjadi pada keuangan di SKPD karena adanya perubahan peraturan dari Pemerintah dan sesuai tujuan awal fungsi dari pengelolaan keuangan tersebut sesuai juknis di dalam undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Purnama & Nadirsyah (2016) yang

menyatakan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten Aceh Barat Daya.

- 2) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus UPT Puskesmas Banyudono I)

Berdasarkan hasil analisis dan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan adanya uji t yaitu thitung 2,419 $>$ ttabel 1, 67866 dan tingkat signifikansinya 0,020 $< 0,05$. Hal ini berarti H_a dapat diterima dan H_0 ditolak sehingga akuntabilitas keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian mengonfirmasi peran akuntabilitas secara teoritik yaitu penerapan prinsip akuntabilitas dalam bekerja dapat meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi melalui penyediaan informasi yang detail tentang setiap pekerjaan sehingga memudahkan manajemen untuk melakukan evaluasi dan penilaian kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Jitmau, et al., (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten sorong.

- 3) Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus UPT Puskesmas Banyudono I)

Berdasarkan hasil analisis dan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan adanya uji t yaitu thitung 3,048 $>$ ttabel 1, 67866 dan tingkat signifikansinya 0,004 $< 0,05$. Hal ini berarti H_a dapat diterima dan H_0 ditolak sehingga transparansi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai, penyebab transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai adalah karena transparansi melalui SKPD mengungkapkan informasi keuangan kepada publik melalui media secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Benawan, (2018) menyatakan bahwa



transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kota Tidore.

5. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya peningkatan kinerja pegawai di UPT Puskesmas Banyudono I dipengaruhi faktor pengawasan, akuntabilitas dan transparansi sebesar 67,1%.

6. Keterbatasan Dan Saran

Terdapat beberapa keterbatasan di penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1). Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian hanya mencakup seluruh pegawai/karyawan UPT Puskesmas Banyudono I, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih luas. 2). Dalam penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari instrumen kuesioner yang didasarkan pada persepsi jawaban responden, sehingga kesimpulan yang diambil hanya didasarkan dari data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen kuesioner secara tertulis tanpa dilengkapi dengan wawancara langsung terhadap objek lokasi penelitian.

Saran yang hendak disampaikan peneliti di penelitian ini adalah untuk peneliti selanjutnya diharapkan responden sebaiknya tidak hanya diberikan kuesioner saja, tetapi juga diwawancara secara terbuka, sehingga lebih dapat menggambarkan keadaan atau kondisi responden sebenarnya, sehingga peneliti dapat mengontrol alur penelitian agar dapat mengurangi informasi dan kendala yang terjadi dapat dikurangi atau diminimalisir.

7. Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terimakasih ITB AAS Surakarta yang selalu membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Benawan, E. T. P., Saerang, D. P. E. & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 13(3): 72-79.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
- Jitmau, F., Kalangi, L. & Lambey, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing: Goodwill*, 8(1), 276-285.
- Kurniawan, T. H., & Efendi, D. (2019). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1-19.
- Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI 2003. *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan BPKP.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil*, 8 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 297 Tahun 2018. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5*



- Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.
- Purnama & Nadirsyah. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 1-15.
- Simamora, H. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.

